

BAB V

KESIMPULAN

Sejarah kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia tidak ada catatan yang pasti, kapan tepatnya orang-orang Tionghoa untuk pertama kali datang ke Nusantara, begitu juga ke Yogyakarta. Namun seiring berkembangnya waktu, gelombang kedatangan besar-besaran orang Tionghoa ke Indonesia diperkirakan terjadi pada abad XVI khususnya di Pulau Jawa.

Saling berinteraksi antar Tionghoa dan pribumi merupakan hal yang sangat bagus, proses interaksi serta asimilasi etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain faktor pendukung adanya asimilasi, toleransi, sikap menghormati serta terjadinya kawin campur. Persamaan unsur-unsur budaya antara masyarakat pribumi dan orang Tionghoa diantaranya dalam bahasa, sistem teknologi, serta mata pencahariannya.

Sementara itu, proses Islamisasi dikalangan etnis Tionghoa dipengaruhi karena proses interaksi antar etnis Tionghoa yang sudah ada di Nusantara dengan pribumi setempat yang beragama Islam. Ini merupakan salah satu strategi untuk berbaur dengan masyarakat setempat. Meskipun ada juga etnis Tionghoa beragama Islam datang dari negeri Cina adalah bertujuan untuk menyampaikan agama Islam atau berdakwah ada juga yang berdagang.

Dinamika etnis Tionghoa di bumi Nusantara ini mengalami pasang surut, sejak masa VOC, Orde Lama, Orde Baru hingga menjelang era reformasi 1998. Keberadaan etnis Tionghoa selalu mengalami diskriminasi yang begitu kejam dari pemerintahan politik yang sedang berkuasa. Namun di Yogyakarta kondisinya

agak berbeda dengan daerah lain, seperti Semarang, Kebumen, Malang, Surabaya dll. Meskipun berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah memperlemah kekuasaan politik Sultan, namun Sultan tetap mempunyai otoritas terhadap rakyatnya. Di Yogyakarta, Belanda lantas tidak langsung mempertahankan kekuasaannya secara langsung, melainkan masih terbatas pada kontrak-kontrak politik.

Memasuki era reformasi 1998, merupakan kabar gembira bagi etnis Tionghoa sekaligus bisa menghirup kebebasan. Bagi orang-orang Cina peranakan yang tinggal menetap turun temurun di Indonesia yang memperjuangkan agar tidak lagi disebut dengan Cina, melainkan dengan sebutan orang Tionghoa. Disamping itu ada alasan hak asasi manusia dan sikap non diskriminasi, sejak masa pemerintahan B.J. Habibie melalui intruksi Presiden No.26 Tahun 1998 tentang penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi, seluruh aparatur pemerintahan telah diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah tersebut. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah menunjuk pada keragaman etnis saja.

Dalam berpolitik etnis Tionghoa di Yogyakarta mulai tumbuh, munculnya etnis Tionghoa yang terjun langsung ke dunia politik membuktikan bahwa sudah tidak lagi canggung dalam bergerak di dunia politik. Hal ini dibuktikan adanya beberapa orang etnis Tionghoa yang masuk ke dunia politik sekitar 8-15 orang. Secara umum warga etnis Tionghoa Yogyakarta masih memilah-milah terhadap politik praktis serta masih bingung dalam menentukan pilihannya, meskipun sudah memiliki kebebasan dalam berpolitik.

Fenomena yang menarik yang perlu dicatat adalah munculnya beberapa nama anggota DPR baik ditingkat lokal maupun pusat dari kalangan etnis Tionghoa. Di Yogyakarta geliat gerakan partisipasi masyarakat Tionghoa terus menanjak naik dengan tampilnya beberapa tokoh etnis Tionghoa muslim di Yogyakarta. Mereka diantaranya Ir. Tjiandra Wijaya Wong dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Alvin Lie Ling Piao dari Partai Amanat Nasional, Bapak Budi Setyagraha dari fraksi PAN, Kwik Kian Gie, Ir. Engartiato Lukita dari Golkar, dan LT Susanto dari Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia. Sementara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat nama-nama seperti Hartati Murdaya Poo dari Walubi yang mewakili utusan golongan serta Daniel Budi Setiawan yang merupakan wakil utusan daerah Jawa Tengah.